

KATALOG : 9201012.7315



**INDIKATOR MAKRO
SOSIAL EKONOMI
KABUPATEN PINRANG**

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**



INDIKATOR MAKRO
SOSIAL EKONOMI
KABUPATEN PINRANG

2017

Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pinrang 2018

Katalog : 9201012.7315

No Publikasi : 73150.1820

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : vii + 49 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Gambar Cover oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Ilustrasi Cover :

Tugu Pahlawan

Diterbitkan oleh :

© BPS Kabupaten Pinrang

Dicetak oleh :

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik**

Kata Pengantar

Pembuatan publikasi ini didasarkan akan semakin meningkatnya kesadaran pengguna data di Kabupaten Pinrang akan data yang bersifat universal/umum, update dan strategis berkaitan tentang data sosial ekonomi di Kabupaten Pinrang.

Data yang dicakup dalam publikasi ini antara lain kependudukan, tenaga kerja, PDRB, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), produksi berbagai jenis tanaman pangan serta data kemiskinan.

Akhirnya semoga publikasi ini dapat bermanfaat untuk seluruh konsumen data. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam terciptanya publikasi ini. Kritik dan saran sangat ditunggu untuk perbaikan publikasi-publikasi berikutnya.

Pinrang, 3 Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pinrang

Muhammad Asri Lantong, SE
NIP.19661121 199301 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Penjelasan Teknis	1
Bab I Penduduk & Tenaga Kerja	8
Bab II PDRB & Pertumbuhan Ekonomi	20
Bab III Indeks Pembangunan Manusia	31
Bab IV Kemiskinan	44
Daftar Pustaka	49

Daftar Tabel

No Tabel	Nama Tabel	Hal
1.1	Jumlah Penduduk Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin, 2017	8
1.2	Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif Tahun 2017	9
1.3	Jumlah Penduduk Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2014-2017 (Jiwa)	11
1.4	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2017	13
1.5	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2013-2017	14
1.6	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015-2017	15
1.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2013-2017	18
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013-2017	19
2.1	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Distribusinya Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang, 2017**)	22
2.2	PDRB Kabupaten Pinrang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (milyar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (%) Tahun 2017**)	23
2.3	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusinya Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang Tahun 2017**)	24
2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2013-2017 (Persen)	26
2.5	PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	27
2.6	PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	28
2.7	PDRB Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan Tahun 2016-2017 (miliar rupiah)	29
2.8	Peranan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2017 (Persen)	30
3.1	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya Kabupaten Pinrang, 2013-2017	33
3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013-2017	36
3.3	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014 & 2017	38

No Tabel	Nama Tabel	Hal
3.4	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2017	40
3.5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017	42
4.1	Statistik Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017	45
4.2	Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2017	46

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Daftar Grafik

No Gambar	Nama Gambar	Hal
1.1	Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang 2017	10
1.2	Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2017	15
1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2017	16
1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2017	17
2.1	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 (Persen)	21
2.2	Laju Pertumbuhan PDRB (persen) Tahun 2013-2017	25
3.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017	36
4.1	Persentase Penduduk Miskin kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017	46

Penjelasan Teknis

Penduduk

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Produk Domestik Regional Bruto

Penjumlahan nilai tambah dalam satu periode tertentu di suatu wilayah tertentu dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Output

Output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. Output tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya.

Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa sebagai biaya antara agar menjadi output. Oleh karenanya secara matematis nilai tersebut dapat dihitung menggunakan formula sederhana berikut ini.

$$\text{NTB} = \text{Output} - \text{Input antara}$$

$$\text{NTB} = \text{nilai tambah bruto}$$

Biaya Antara

Biaya antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban untuk penyelesaian pekerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara.

Pertumbuhan ekonomi triwulan ke triwulan (q to q)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (y on y)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dalam tahun tertentu dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi c to c

PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya.

Sumber pertumbuhan (*source of growth*) menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran dalam PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Untuk memperoleh sumber-sumber pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing *share* sektor atau komponen pengeluaran terhadap PDRB.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponennya itu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditidi perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Ukuran Kemiskinan

- a. *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Usia Kerja

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas usia kerja.

Angkatan Kerja

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

Bekerja

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

Pengangguran

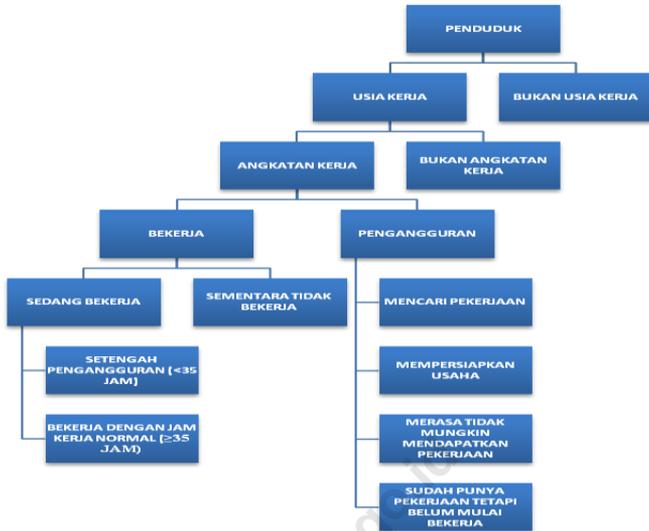
Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut:

Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam perekonomian.

Diagram Ketenagakerjaan



Inflasi

Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa tersebut jumlahnya sangat banyak, namun “keranjang” barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Jumlah komoditas tersebut bervariasi antarkota, yang terkecil terdapat di Kota Tarakan sebanyak 284 komoditas, sedangkan yang terbanyak terdapat di Jakarta (441 komoditas), secara rata-rata sebanyak 335 komoditas (dari 66 kota). Angka tersebut merupakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang merupakan patokan untuk menyusun inflasi.

Ekspor dan Impor

Konsep dan definisi yang dipakai dalam pencatatan ekspor-impor barang yang dilakukan oleh BPS berdasarkan konsep dan definisi dalam *International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions* (series M no. 52 Revisi 2) yang diterbitkan oleh United Nations tahun 1998. Sebagai anggota *United Nations Statistical Office* dan berdasarkan konvensi internasional maka BPS harus mengikuti/memakai konsep dan definisi tersebut. Dengan demikian data yang dihasilkan oleh BPS bisa dipakai untuk perbandingan internasional.

Berdasarkan konsep dan definisi *International Merchandise Trade Statistics* beberapa hal dapat diberikan di sini.

- a. Ekspor barang adalah seluruh barang yang dibawa ke luar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun nonkomersial (seperti barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri yang hasilnya dimasukkan kembali barang yang dikirim untuk perwakilan suatu negara di luar negeri; (3) Barang untuk eksebis/pameran; (4) Peti kemas untuk diisi kembali; (5)

Uang dan surat-surat berharga; (6) Barang-barang untuk contoh (*sample*).

- b. Impor barang adalah seluruh barang yang masuk ke wilayah suatu negara baik bersifat komersial maupun bukan komersial, serta barang yang akan diolah di dalam negeri yang hasilnya dikeluarkan lagi dari negara tersebut. Tidak termasuk dalam statistik impor adalah: (1) Pakaian dan barang-barang perhiasan penumpang; Barang-barang penumpang untuk dipakai sendiri, kecuali lemari es, pesawat TV dan sebagainya; (2) Barang-barang yang dikirim untuk keperluan perwakilan (kedutaan) suatu negara; (3) Barang-barang untuk ekspedisi/penelitian ilmiah dan eksepsi/pameran; (4) Pembungkus/peti kemas; (5) Uang dan surat-surat berharga; (6) Barang-barang sebagai contoh (sampel).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan rata-rata dari indeks longevity, indeks pendidikan dan indeks tingkat hidup layak. Terdapat 4 indikator (dari 3 dimensi) pembentuk angka IPM :

1. Dimensi Kesehatan diukur dengan indikator : Angka Harapan Hidup,
2. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator : Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah,
3. Dimensi Hidup Layak diukur dengan indikator : Pengeluaran Perkapita Disesuaikan.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$); (2) Tinggi ($70 \leq IPM < 80$); (3) Sedang ($60 \leq IPM < 70$); (4) Rendah ($IPM < 60$). Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Ukuran Kecepatan / Reduksi Shortfall IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_t} \times 100$$

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan

Nilai Tukar Petani

NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). NTP untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani.

Indeks harga yang diterima petani (It) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani.

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

Indeks Tendensi Konsumen

Indeks Tendensi Konsumen (ITK): indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang; dengan nilai:

Nilai ITK	Keterangan
(1)	(2)
ITK>100	kondisi ekonomi konsumen lebih baik dari periode sebelumnya
ITK<100	kondisi ekonomi konsumen lebih buruk dari periode sebelumnya
ITK=100	kondisi ekonomi konsumen sama dengan periode sebelumnya.

Jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh BPS telah mengacu pada konsep dan definisi yang digunakan seragam oleh dunia internasional, sehingga angkanya dapat dipertanggungjawabkan dan diperbandingkan karena telah menggunakan konsep yang sama. Konsep yang digunakan tentang penduduk ialah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin, 2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Total	
0 - 4	18 544	17 797	36 341	104,20
5 - 9	18 835	18 060	36 895	104,29
10 - 14	18 582	17 997	36 579	103,25
15 - 19	16 438	15 711	32 149	104,63
20 - 24	14 007	14 053	28 060	99,67
25 - 29	13 274	13 896	27 170	95,52
30 - 34	11 956	13 034	24 990	91,73
35 - 39	11 630	13 278	24 908	87,59
40 - 44	12 608	13 614	26 222	92,61
45 - 49	11 528	12 892	24 420	89,42
50 - 54	9 241	10 823	20 064	85,38
55 - 59	7 381	8 707	16 088	84,77
60 - 64	5 900	7 113	13 013	82,95
65 - 69	4 418	5 567	9 985	79,36
70 - 74	3 069	4 258	7 327	72,08
75 +	3 175	4 844	8 019	65,55
Jumlah	180 586	191 644	372 230	94,23

Sumber : Proyeksi Penduduk. BPS

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal atau beban pembangunan. Kunci utama masalah jumlah penduduk yang besar adalah kualitasnya karena tanpa kualitas yang baik justru akan menjadi beban pembangunan. Dengan diperolehnya data penduduk Kabupaten Pinrang yang akurat, maka dapat teridentifikasinya berbagai permasalahan kependudukan

yang terjadi riil dimasyarakat, mulai dari masalah jumlah, persebaran hingga komposisi penduduk yang tidak merata antara kota dan desa.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif Tahun 2017

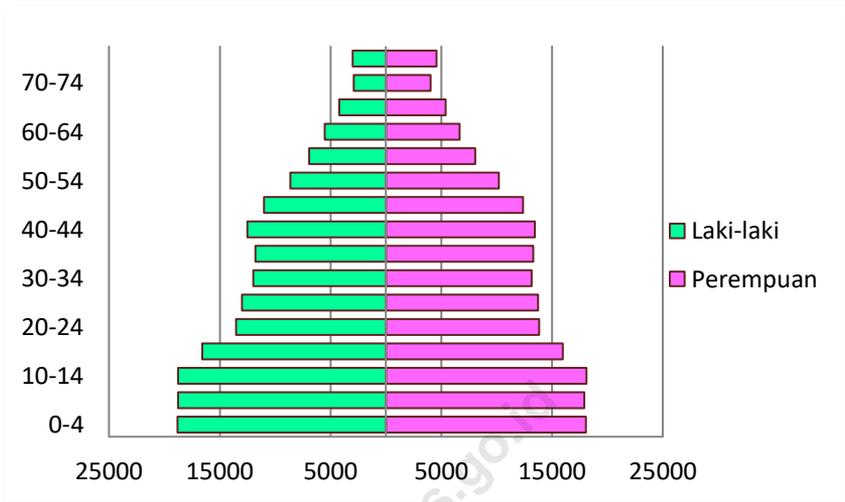
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	30,99	28,10	29,50
15 - 64	63,11	64,24	63,69
65+	5,90	7,65	6,81
Total	100,00	100,00	100,00
Populasi	180 586	191 644	372 230

Sumber : Proyeksi Penduduk. BPS

Penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2017 tercatat sebagian besar berada dalam kelompok usia produktif yaitu 15-64 tahun yaitu sekitar 63.69 persen. Data menunjukkan juga bahwa pada tahun 2016 rasio ketergantungan (dependency ratio) atau lebih dikenal dengan angka beban ketergantungan mencapai 57 persen. Artinya dari 100 orang usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung 57 orang usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif perempuan (64,24 persen) lebih besar dibanding laki-laki yaitu mencapai 63,11 persen, begitu pula pada usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 dan 65+) laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Data ini bisa mencerminkan bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Pinrang mempunyai peranan dalam hal ketersediaan SDM di usia produktif, ini bisa menjadikan dasar pertimbangan otoritas pemangku kebijakan daerah untuk lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan serta program-program membangun yang bisa mengoptimalkan ketersediaan SDM penduduk perempuan.

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang 2017



Melihat bentuk piramida penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2017, cenderung mirip jenis piramida muda (ekspansif) yang biasanya berada di negara-negara negara berkembang. Bentuk piramida ini ditandai dengan suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Piramida ini dicirikan sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda. Adapaun ciri khusus dari jenis piramida ini antara lain:

- Jumlah penduduk usia muda (0–19 tahun) sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.
- Pertumbuhan penduduk relatif tinggi.
- Sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Republik Rakyat Cina, Mesir, dan India.

Tabel dibawah ini menampilkan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang hasil proyeksi penduduk di masing-masing kecamatan.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2014-2017 (Jiwa)

Kecamatan	2014	2015	2016	2017
Suppa	31 454	31 687	31 929	32 159
Mattiro Sompe	27 922	28 126	28 339	28 540
Lanrisang	17 390	17 518	17 651	17 775
Mattiro Bulu	27 635	27 839	28 053	28 251
Watang Sawitto	54 734	55 144	55 571	55 972
Paleteang	39 502	39 799	40 107	40 397
Tiroang	21 781	21 943	22 112	22 269
Patampanua	32 404	32 645	32 894	33 126
Cempa	17 703	17 833	17 970	18 097
Duampanua	44 764	45 096	45 438	45 761
Batulappa	9 880	9 953	10 027	10 098
Lembang	38 918	39 206	39 504	39 785
Pinrang	364 087	366 789	369 595	372 230

Sumber : Proyeksi Penduduk. BPS

Para pengguna data kependudukan, khususnya para perencana, dan pengambil kebijakan sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, sumber data penduduk yang tersedia hanya secara periodik, yaitu Sensus Penduduk (SP) pada tahun yang berakhir dengan angka 0 (nol) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada pertengahan dua sensus atau tahun-tahun yang berakhir dengan angka 5 (lima). Untuk mendapatkan data jumlah penduduk yang ideal maka seharusnya membutuhkan pendataan lengkap yakni sensus penduduk secara periodik tahunan. Tetapi kegiatan sensus penduduk dewasa ini di Indonesia secara umum belum dapat dilakukan secara tahunan, ditambah Sumber data kependudukan lain yaitu registrasi penduduk masih belum sempurna cakupan pencatatannya sehingga datanya belum dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu mengacu amanat undang-undang tentang statistik maka pelaksanaannya hanya dilakukan 10 tahun sekali, BPS telah melaksanakannya mulai tahun 1970 hingga yang terakhir tahun 2010.

Suatu perencanaan yang berkaitan dengan rakyat pastilah harus ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan komposisinya menurut kelompok umur penduduk yang relevan. Oleh karena sensus yang dilaksanakan oleh BPS hanya setiap 10 tahun sekali, maka dilakukan proyeksi penduduk dengan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain serta target yang diharapkan tercapai pada masa yang akan datang.

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 menempati urutan keenam terbesar di Sulawesi Selatan. Tercatat jumlah penduduk sebesar 372.230 jiwa atau meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 369.595 jiwa (tahun 2016). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan proyeksi penduduk 0,71 persen. Jika melihat persebaran jumlah penduduk terlihat bahwa penduduk Kabupaten Pinrang sebagian besar berada di ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Watang Sawitto dengan 55.972 jiwa atau dengan persentase terbesar yang mencapai 15,04 persen. Keadaan ini tidak mengherankan dikarenakan Kecamatan Watang Sawitto merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Pinrang. Sedangkan Kecamatan Batulappa dengan jumlah penduduk terendah yang hanya 10.098 jiwa atau 2,71 persen.

Ketenagakerjaan

Kebutuhan dasar selain sandang, pangan dan papan adalah pekerjaan. Status bekerja tidak hanya merupakan status sosial dimasyarakat tetapi jauh lebih dari itu merupakan ibadah dan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Indikator ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk mengevaluasi perencanaan pembangunan suatu daerah dalam hal penyerapan tenaga kerja sekaligus produktifitas tenaga kerja.

Perlu diakui pekerjaan adalah motor perekonomian, apabila perekonomian ini tidak mampu menyerap tenaga kerja maka akan menciptakan pengangguran dan akibatnya adalah akan timbul masalah-masalah sosial di masyarakat. Dikarenakan keterbatasan data dalam hal estimasi tingkat kabupaten/kota seluruh indonesia maka pada publikasi ini hanya akan ditampilkan data sampai tahun 2015.

Tabel 1.4 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2017

Kegiatan	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	144 609	*	153 422
Bekerja	137 591	*	146 653
(%)	53,57	*	55,78
Penganggur	7 018	*	6 769
(%)	2,73	*	2,57
Bukan Angkatan Kerja	112 251	*	109 491
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	56,30	*	56,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,96	*	4,41

*Ket : *) Data tidak tersedia. Tidak dilakukan analisis hingga tingkat kabupaten
Sumber : BPS Pinrang*

Penduduk berusia 15 tahun keatas digolongkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK adalah perbandingan jumlah angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Menurut data Sakernas 2017 diketahui bahwa tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pinrang tahun 2015 sebesar 56,35 persen yang artinya dari 100 penduduk usia kerja sekitar 56 diantaranya termasuk angkatan kerja dan sisanya tergolong bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja tetapi mempunyai kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain.

Tabel 1.5 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015-2017

Kegiatan	2015	2016	2017
Pertanian	73 754	*	60 526
Industri	10 612	*	9 459
Perdagangan	21 895	*	36 222
Jasa-Jasa	16 229	*	25 533
Lainnya	15 101	*	14 913
Total	137 591	*	146 653

Ket : *) Data tidak tersedia. Tidak dilakukan analisis hingga tingkat kabupaten
 Sumber : BPS Pinrang

Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Lapangan pekerjaan utama adalah sektor pekerjaan yang paling banyak menghabiskan waktu dalam bekerja dan memperoleh pendapatan yang paling besar.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten besar di Sulawesi Selatan dan merupakan penyumbang share perekonomian terbesar pula. Potensi daerah yang terdapat di laut dan tanahnya yang relatif subur menyebabkan sektor pertanian cukup menonjol. Kabupaten Pinrang adalah salah satu andalan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penghasil pertanian padi dan bahkan disebut sebagai lumbung padi dan perikanan terutama perikanan tangkap dan budidaya. Oleh sebab itu sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2017 di Kabupaten Pinrang banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 60.526 jiwa atau mencapai 41,27 persen diikuti sektor perdagangan sebesar 36.222 jiwa atau 17,41 persen dan terendah adalah sektor industri yang hanya sebesar 9.459 jiwa atau 6,45 persen.

Tabel 1.6 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015-2017

Kegiatan	2015	2016	2017
Berusaha Sendiri	19.288	*	31 667
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar	47.768	*	43 123
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	6.689	*	4 249
Pekerja/Buruh/Karyawan	35.660	*	39 470
Pekerja Bebas	2 876	*	4 947
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	25.310	*	23 197
Total	137.591	*	146 653

Ket : *) Data tidak tersedia. Tidak dilakukan analisis hingga tingkat kabupaten
 Sumber : BPS Pinrang

Berdasarkan status pekerjaan utama diketahui sebanyak 43.123 jiwa atau 29,40 persen penduduk berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar usaha di Kabupaten Pinrang lebih banyak bekerja dengan sistem kekeluargaan tanpa ada balas jasa dan ini juga ciri usaha mikro kecil (UMK). Untuk status pekerjaan utama paling sedikit adalah Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yang hanya 4.249 jiwa atau 2,89 persen.

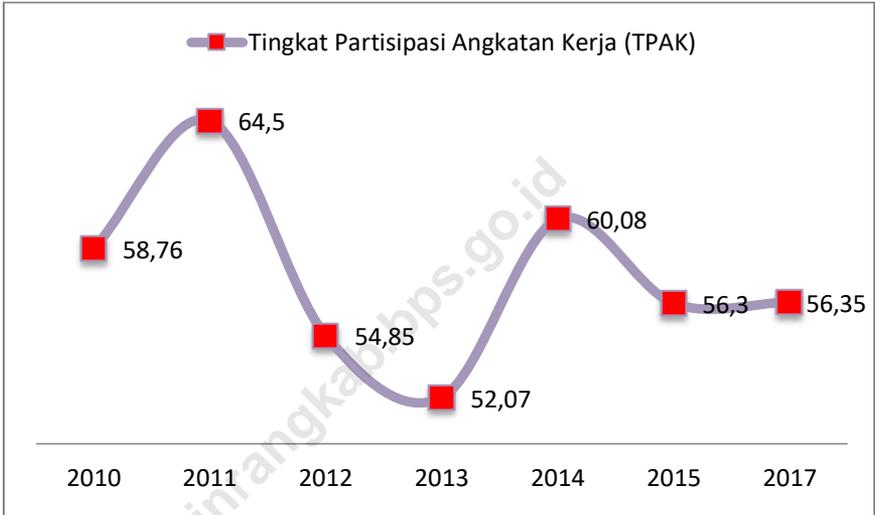
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pinrang. Tahun 2010-2017



Sumber : BPS Pinrang

Tren jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang menunjukkan terus meningkat dari tahun ke tahun, walaupun sempat terjadi penurunan setidaknya di tahun 2010 dan 2017. Penurunan angka terjadi pada tahun tersebut dikarenakan fenomena pergeseran sistem pertanian dengan lebih menggunakan teknologi terutama pada saat penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak lagi.

Gambar 1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang. Tahun 2008-2017



Sumber : BPS Pinrang

Indikator yang dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kabupaten Pinrang mengalami kecenderungan penurunan walaupun sempat juga mengalami fluktuasi setidaknya pada tahun 2011 dan 2014. Pada tahun 2017 TPAK menunjukkan 56,35 atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,05, kondisi ini mengindikasikan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di pinrang meningkat.

**Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Pinrang. Tahun 2008-2017**



Sumber : BPS Pinrang

Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pinrang kurun waktu tahun 2010 – 2017 terjadi fluktuasi, pada tahun 2010 pernah mencapai 7,79 persen dan terus mengalami penurunan hingga setidaknya hingga tahun 2013 TPT berada pada titik terendah yaitu 1,96 persen. Kemudian tahun berikutnya mengalami kenaikan 4,85 persen di tahun 2015 namu pada tahun 2017 TPT Kabupaten Pinrang mengalami penurunan mencapai 4,41 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 orang merupakan pengangguran.

Tabel 1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2013-2017

No.	Kabupaten /Kota	T P A K				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kep, Selayar	61,11	60,60	67,64	*	60,2
2	Bulukumba	62,25	65,02	65,35	*	60,56
3	Bantaeng	68,74	71,93	72,83	*	77,7
4	Jeneponto	61,96	61,74	60,78	*	63,88
5	Takalar	57,69	62,91	57,56	*	64,37
6	Gowa	64,17	66,32	58,33	*	62,17
7	Sinjai	70,34	68,78	65,28	*	69,61
8	Maros	60,98	62,96	65,04	*	57,8
9	Pangkep	54,41	57,60	59,25	*	59,36
10	Barru	53,43	50,39	52,63	*	59,47
11	Bone	63,30	63,94	64,94	*	57,98
12	Soppeng	57,22	57,59	56,29	*	60,84
13	Wajo	58,16	55,55	57,24	*	58,84
14	Sidrap	52,25	54,00	53,27	*	49,17
15	Pinrang	52,07	60,08	56,30	*	58,35
16	Enrekang	70,27	68,25	68,10	*	70,35
17	Luwu	58,69	62,50	60,78	*	64,69
18	Tana Toraja	70,55	80,31	82,79	*	67,12
19	Luwu Utara	62,02	66,68	65,81	*	69,21
20	Luwu Timur	65,01	67,21	69,75	*	70,03
21	Toraja Utara	65,25	69,80	67,56	*	65,33
22	Makassar	--	56,87	55,20	*	55,23
23	Pare-Pare	57,72	60,62	60,25	*	66,65
24	Palopo	58,13	58,05	54,27	*	59,56
Sulawesi Selatan		60,49	62,04	60,94	*	60,98

Sumber : BPS Pinrang

TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2015 berada diposisi 20 dengan 56,30 persen, dan masih dibawah rata-rata TPak Sulawesi Selatan yang mencapai 60,94 persen. Artinya keterlibatan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Pinrang masih dibawah rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013-2017

No,	Kabupaten /Kota	T P T				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kep, Selayar	4,62	2,15	0,90	*	2,34
2	Bulukumba	4,16	2,84	3,00	*	3,73
3	Bantaeng	6,44	2,42	4,07	*	5,23
4	Jeneponto	2,77	2,73	4,00	*	3,31
5	Takalar	2,73	2,75	4,04	*	4,93
6	Gowa	2,63	2,32	4,96	*	6,14
7	Sinjai	0,43	0,88	1,55	*	4,53
8	Maros	5,71	4,55	6,99	*	6,85
9	Pangkep	5,70	9,87	7,01	*	7,05
10	Barru	4,51	2,27	7,68	*	5,6
11	Bone	3,80	4,96	4,36	*	4,55
12	Soppeng	6,56	2,43	2,96	*	2,71
13	Wajo	3,72	4,92	5,39	*	3,06
14	Sidrap	7,62	6,20	6,97	*	3,17
15	Pinrang	1,96	2,78	4,85	*	4,41
16	Enrekang	1,61	1,44	1,33	*	1,87
17	Luwu	7,14	5,06	7,86	*	4,78
18	Tana Toraja	3,26	3,26	3,99	*	5,6
19	Luwu Utara	4,84	1,82	2,60	*	3,31
20	Luwu Timur	6,28	8,12	5,37	*	2,58
21	Toraja Utara	2,82	3,66	3,11	*	4,24
22	Makassar	-	10,94	12,02	*	10,59
23	Pare-Pare	4,86	7,06	8,48	*	6,47
24	Palopo	9,03	8,15	12,07	*	10,96
Sulawesi Selatan		5,10	5,08	5,95	*	5,61

Sumber : BPS Pinrang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang tahun 2015 berada diposisi 12, dengan 4,85 persen dan masih dibawah rata-rata TPT Sulawesi Selatan yang mencapai 5,95 persen. TPT tertinggi berada di Kota Palopo dengan 12,07 persen, Kota Makassar 8,48 persen dan urutan ketiga adalah Kota Parepare dengan 8,48 persen.

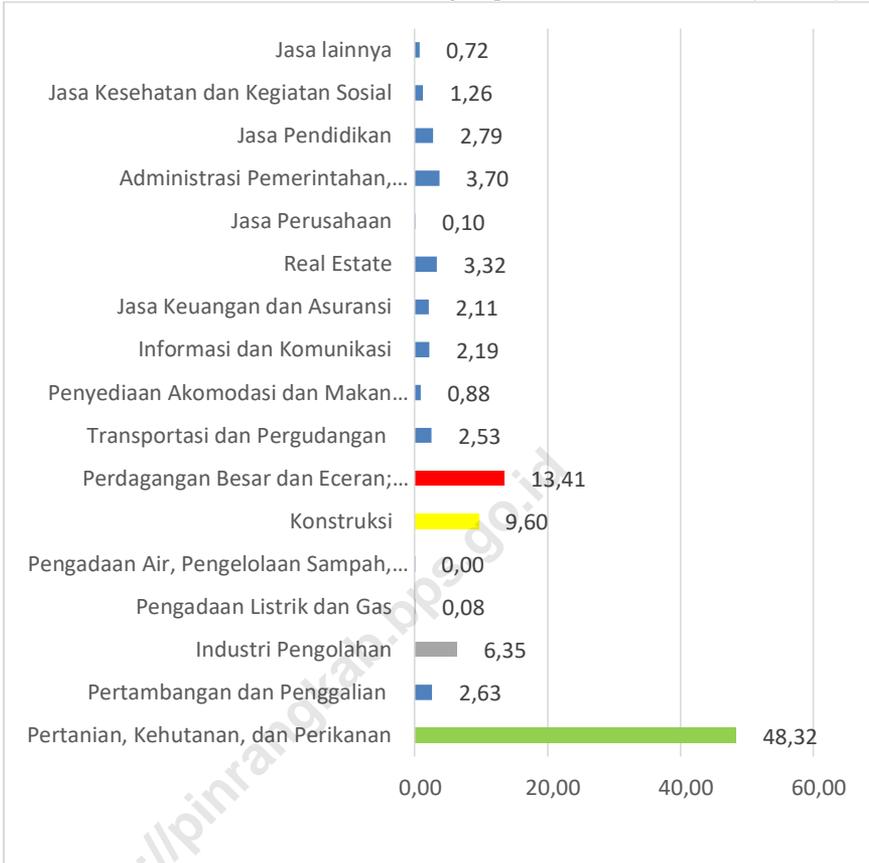
Dalam perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan beraneka ragam data statistik sebagai dasar dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dengan tepat dapat dicapai. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasilhasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

2.1 Struktur Ekonomi

Melihat struktur perekonomian Kabupaten Pinrang berupa PDRB Atas dasar harga berlaku tahun 2017, sebagai daerah agraris Kabupaten Pinrang masih sangat mengandalkan sumber perekonomian dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 48 sampai dengan 49 persen. Kemudian lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan 13 persen serta sektor konstruksi yang mencapai hampir 10 persen, merupakan penopang dan penggerak perekonomian utama disamping sektor-sektor lainnya. Selain itu industri pengolahan mempunyai kontribusi cukup besar mencapai 6 persen, itu artinya sektor ini cukup menjanjikan untuk terus dikembangkan dan Sementara itu peranan lapangan usaha lainnya kontribusinya di bawah 10 persen.

Gambar 2.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 (Persen)



Sumber : BPS Pinrang

Tabel 2.1 PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Distribusinya Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang, 2017)**

	Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rp)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Distribusi (%)
		ADHB	ADHK		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7 930,55	5 263,45	7,58	48,32
B	Pertambangan dan Penggalian	430,86	248,09	11,22	2,63
C	Industri Pengolahan	1 041,41	701,12	8,26	6,35
D	Pengadaan Listrik , Gas dan Produksi Es	12,77	12,62	5,95	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,72	0,57	6,27	0,00
F	Konstruksi	1 576,24	1 028,44	6,54	9,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 200,90	1 630,83	10,12	13,41
H	Transportasi dan Pergudangan	415,35	311,62	7,54	2,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,02	98,75	8,57	0,88
J	Informasi dan Komunikasi	359,96	324,62	9,79	2,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	346,56	231,33	2,23	2,11
L	Real Estate	545,46	359,34	6,58	3,32
M,N	Jasa Perusahaan	17,21	13,29	7,02	0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	607,01	416,09	4,88	3,70
P	Jasa Pendidikan	457,15	341,72	8,92	2,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206,80	147,08	8,21	1,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	117,40	84,67	9,56	0,72
	PDRB	16 411,36	11 213,63	7,85	100,00

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2 PDRB Kabupaten Pinrang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (milyar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (%) Tahun 2017)**

Lapangan Usaha	ADHB		ADHK		Laju Pertumbuhan
	2016*	2017**	2016*	2017**	y on y
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7 138,38	7 930,55	4 892,40	5 263,45	7,58
2 Pertambangan dan Penggalian	382,99	430,86	223,06	248,09	11,22
3 Industri Pengolahan	922,93	1 041,41	647,62	701,12	8,26
4 Pengadaan Listrik, Gas	10,06	12,77	11,91	12,62	5,95
5 Pengadaan Air	0,67	0,72	0,54	0,57	6,27
6 Konstruksi	1 420,04	1 576,24	965,31	1 028,44	6,54
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 927,87	2 200,90	1 480,94	1 630,83	10,12
8 Transportasi dan Pergudangan	390,06	415,35	289,78	311,62	7,54
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,76	145,02	90,96	98,75	8,57
10 Informasi dan Komunikasi	318,55	359,96	295,68	324,62	9,79
11 Jasa Keuangan	322,95	346,56	226,28	231,33	2,23
12 Real Estate	499,96	545,46	337,15	359,34	6,58
13 Jasa Perusahaan	15,69	17,21	12,42	13,29	7,02
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	562,34	607,01	396,72	416,09	4,88
15 Jasa Pendidikan	404,56	457,15	313,73	341,72	8,92
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	186,34	206,80	135,92	147,08	8,21
17 Jasa lainnya	104,82	117,40	77,28	84,67	9,56
PDRB Pinrang	14 736,96	16 411,36	10 397,72	11 213,63	7,85
PDRB Sulsel	379 632,26	418 931,58	269 423,09	288 908,62	7,23

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.3 PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusinya Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang Tahun 2017)**

Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rp)		Laju	Distribusi
	ADHB	ADHK	Pertumbuhan Ekonomi (%)	(%)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9 152,78	6 228,87	6,95	55,77
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	110,77	69,25	7,15	0,67
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 207,28	771,41	4,77	7,36
4 Pembentuk Modal Tetap Domestik Bruto	6 018,30	4 060,57	8,72	36,67
5 Perubahan Inventori	157,77	129,72		0,96
6 Ekspor Barang dan Jasa	5 577,87	3 805,41	9,89	33,39
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5 813,41	3 851,60	7,00	35,42
PDRB Kab, Pinrang	16 411,36	11 213,63	7,85	100,00
PDRB Sulsel	418 931,58	288 908,62	7,23	

***) Angka Sangat Sementara

Struktur perekonomian Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 tak lepas dari peranan masing-masing komponen pembentuknya. Data empiris PDRB menurut pengeluaran diantaranya menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

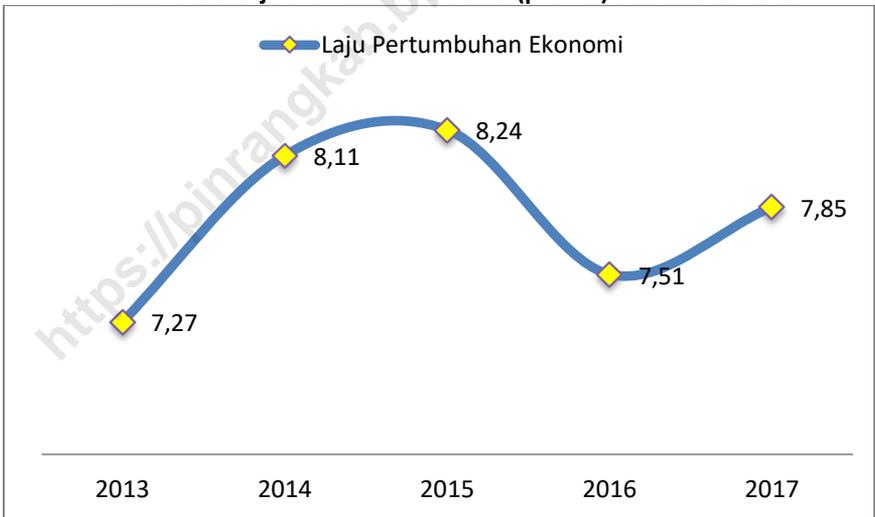
Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Terecat kontribusinya sebesar 55,77 persen dan laju pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu sebesar 6,95 persen. Selanjutnya distribusi terbesar kedua adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) besarnya

ialah 36,67 persen dan laju pertumbuhan dibandingkan tahun lalu ialah terbesar dibandingkan komponen lainnya yang mencapai 8,72 persen. Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Komponen terbesar ketiga ialah konsumsi akhir pemerintah dengan 7,36 persen dan komponen lainnya kurang dari satu persen saja.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 5 tahun berfluktuasi pada tahun 2013 tercatat pertumbuhan ekonomi 7,27 persen tahun-tahun setelahnya selalu mencatatkan hasil positif meskipun dengan kecepatan yang bervariasi. Pada tahun 2016 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tercatat hanya 7,51 persen saja. Kemudian kembali mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 7,85 persen.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB (persen) Tahun 2013-2017



Kabupaten Pinrang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 7,85 persen pada tahun 2017, masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya berada di bawah 7,23 persen. Untuk bisa melihat lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2013-2017 (Persen)

No,	Kabupaten /Kota	Pertumbuhan per Tahun				
		2013	2014	2015	2016*)	2017**)
1	Kep, Selayar	8,18	9,01	8,81	7,35	7,61
2	Bulukumba	7,77	8,54	5,66	6,79	6,92
3	Bantaeng	9,00	8,34	6,64	7,39	7,32
4	Jeneponto	6,64	7,94	6,53	8,37	8,26
5	Takalar	8,80	9,77	8,41	9,61	7,39
6	Gowa	9,42	7,17	6,80	7,61	7,23
7	Sinjai	7,79	6,99	7,54	7,09	7,23
8	Maros	6,28	4,73	8,58	9,50	6,81
9	Pangkep	9,33	10,42	7,98	8,31	6,60
10	Barru	7,87	7,36	6,32	6,01	6,48
11	Bone	6,30	9,53	8,30	9,01	8,43
12	Soppeng	7,23	6,90	5,10	8,14	8,34
13	Wajo	6,92	9,68	7,05	4,98	5,22
14	Sidrap	6,93	7,87	7,92	8,81	7,11
15	Pinrang	7,27	8,11	8,24	7,44	7,85
16	Enrekang	5,84	6,00	6,90	7,64	6,89
17	Luwu	7,74	8,81	7,26	7,88	6,79
18	Tana Toraja	7,19	6,82	6,85	7,32	7,50
19	Luwu Utara	7,39	8,83	6,67	7,49	7,60
20	Luwu Timur	6,30	8,11	6,85	1,58	3,07
21	Toraja Utara	9,70	7,64	7,69	8,04	8,22
22	Makassar	8,55	7,40	7,44	8,03	8,23
23	Pare-Pare	7,95	6,33	6,28	6,87	6,99
24	Palopo	8,02	7,06	6,48	6,95	7,19

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PNDRB Per kapita pada tahun 2017 terbesar berada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terbesar 21,31 juta rupiah, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,91 juta rupiah dan terkecil ada di sektor pengadaan air yang nilainya nol dibawah dua digit dibelakang koma.

**Tabel 2.5 PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**

	Lapangan Usaha	PDRB Perkapita				
		2013	2014	2015	2016 ^(*)	2017 ^(**)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,07	15,10	15,48	19,31	21,31
2	Pertambangan dan Penggalian	0,57	0,75	0,92	1,04	1,16
3	Industri Pengolahan	1,70	1,97	2,23	2,50	2,80
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
5	Pengadaan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	2,70	3,03	3,45	3,84	4,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,47	3,87	4,49	5,22	5,91
8	Transportasi dan Pergudangan	0,69	0,82	0,92	1,06	1,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,28	0,31	0,35	0,39
10	Informasi dan Komunikasi	0,70	0,75	0,77	0,86	0,97
11	Jasa Keuangan	0,59	0,67	0,75	0,87	0,93
12	Real Estate	0,91	1,05	1,20	1,35	1,47
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,29	1,37	1,59	1,52	1,63
15	Jasa Pendidikan	0,86	0,89	0,97	1,09	1,23
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,39	0,45	0,50	0,56
17	Jasa lainnya	0,20	0,22	0,25	0,28	0,32
Produk Domestik Regional Bruto		27,38	31,22	35,83	39,87	44,09

Indikator PDRB Per kapita merupakan nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2017 PDRB perkapita yaitu 44,09 juta rupiah.

Tabel 2.6 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

No,	Kabupaten /Kota	PDRB Perkapita				
		2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
1	Kep. Selayar	22,64	27,14	31,86	35,61	39,67
2	Bulukumba	17,75	20,54	23,31	26,18	29,29
3	Bantaeng	24,03	27,23	30,42	34,05	37,46
4	Jeneponto	15,01	17,42	19,69	22,00	24,03
5	Takalar	17,83	20,73	23,78	26,75	29,27
6	Gowa	15,39	16,98	19,03	21,11	23,08
7	Sinjai	23,85	27,42	31,57	34,65	38,10
8	Maros	36,07	40,11	45,94	52,11	56,16
9	Pangkep	43,39	49,86	56,94	62,94	67,65
10	Barru	22,64	26,03	28,87	31,78	34,56
11	Bone	22,79	26,90	31,36	35,21	39,15
12	Soppeng	23,95	27,35	30,27	35,00	39,51
13	Wajo	29,77	34,84	38,45	41,94	45,24
14	Sidrap	24,48	28,08	32,12	36,76	40,37
15	Pinrang	27,38	31,22	35,83	39,87	44,09
16	Enrekang	20,98	23,37	26,20	29,27	31,54
17	Luwu	22,34	25,98	29,59	33,57	36,60
18	Tana Toraja	16,28	18,79	21,43	23,80	26,28
19	Luwu Utara	21,32	25,30	28,73	32,06	35,07
20	Luwu Timur	63,35	70,63	69,73	67,68	70,34
21	Toraja Utara	19,02	22,46	26,10	30,03	34,10
22	Makassar	62,75	70,24	78,94	87,39	96,12
23	Pare-Pare	29,15	32,39	36,50	39,47	43,01
24	Palopo	26,00	28,80	31,68	34,16	37,03

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Catatan : Angka ini adalah angka PDRB Seri 2010

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah besar dengan PDRB terbesar ke kedelapan di Propinsi Sulawesi Selatan. Keterbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7 PDRB Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan Tahun 2016-2017 (miliar rupiah)

No,	Kabupaten /Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
		2016 ^{*)}	2017 ^{**)}	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
1	Kep, Selayar	4 685,89	5 276,74	2 924,72	3 147,39
2	Bulukumba	10 820,01	12 174,86	7 234,36	7 734,71
3	Bantaeng	6 283,51	6 951,08	4 374,25	4 694,36
4	Jeneponto	7 872,79	8 645,02	5 511,79	5 967,18
5	Takalar	7 756,66	8 576,54	5 405,32	5 804,57
6	Gowa	15 524,36	17 271,38	11 169,73	11 977,30
7	Sinjai	8 305,89	9 189,91	5 799,31	6 218,72
8	Maros	17 869,50	19 451,38	11 954,00	12 768,32
9	Pangkep	20 562,66	22 309,72	14 477,29	15 433,50
10	Barru	5 462,42	5 970,10	3 916,34	4 169,98
11	Bone	26 301,04	29 405,40	17 498,18	18 974,05
12	Soppeng	7 920,14	8 947,11	5 549,50	6 012,11
13	Wajo	16 544,74	17 897,72	11 622,81	12 229,04
14	Sidrap	10 770,43	11 955,38	7 182,79	7 693,46
15	Pinrang	14 736,96	16 411,36	10 397,72	11 213,63
16	Enrekang	5 901,17	6 412,46	3 900,20	4 168,97
17	Luwu	11 860,66	13 041,82	8 023,37	8 567,87
18	Tana Toraja	5 479,20	6 084,15	3 667,58	3 942,60
19	Luwu Utara	9 790,45	10 800,79	6 580,97	7 081,17
20	Luwu Timur	19 073,33	20 250,36	14 862,31	15 318,72
21	Toraja Utara	6 815,67	7 788,79	4 086,75	4 422,65
22	Makassar	128 431,59	143 128,68	95 960,51	103 857,09
23	Pare-Pare	5 543,15	6 111,15	4 107,81	4 394,80
24	Palopo	5 906,48	6 550,69	4 428,50	4 746,94

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Catatan : Angka ini adalah angka PDRB Seri 2010

Kabupaten Pinrang tercatat pada tahun 2010 mencatatkan *share* sebesar 3,84 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 3,90 persen, ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Pinrang semakin maju. Namun secara peringkat tidak mengalami peningkatan.

Tabel 2.8 Peranan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2017 (Persen)

No,	Kabupaten/Kota	Peranan/Share		Rank Share	
		2010	2017 ^{**})	2010	2017 ^{**})
1	Kep, Selayar	1,05	1,25	24	24
2	Bulukumba	2,76	2,89	10	10
3	Bantaeng	1,57	1,65	18	18
4	Jeneponto	2,07	2,06	15	15
5	Takalar	1,93	2,04	16	16
6	Gowa	4,15	4,11	7	7
7	Sinjai	2,20	2,18	13	13
8	Maros	4,26	4,62	6	5
9	Pangkep	5,04	5,30	4	3
10	Barru	1,49	1,42	21	23
11	Bone	6,44	6,99	3	2
12	Soppeng	2,16	2,13	14	14
13	Wajo	4,38	4,26	5	6
14	Sidrap	2,58	2,84	11	11
15	Pinrang	3,84	3,90	8	8
16	Enrekang	1,52	1,52	20	20
17	Luwu	2,98	3,10	9	9
18	Tana Toraja	1,39	1,45	23	22
19	Luwu Utara	2,48	2,57	12	12
20	Luwu Timur	6,89	4,81	2	4
21	Toraja Utara	1,46	1,85	22	17
22	Makassar	34,10	34,03	1	1
23	Pare-Pare	1,55	1,45	19	21
24	Palopo	1,70	1,56	17	19
Sulawesi Selatan		100,00	100,00		

^{**}) Angka Sangat Sementara

Catatan : PDRB Tahun 2014 dan selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008

Setelah sebelumnya membahas tentang kependudukan, ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB, maka pada bab ini akan dibahas tentang sudut pandang yang berbeda dari segi konsep pembangunan manusia dari berbagai aspek. Sebagai daerah besar Kabupaten Pinrang tidak terlepas dalam upaya pembangunan namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya mensinergikan antara SDA yang melimpah dan SDM yang banyak.

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat maka perencanaan pembangunan hendaknya tidak hanya mengedepankan pembangunan dibidang ekonomi ataupun pemenuhan sarana dan prasarana, melainkan juga harus melibatkan aspek manusia didalamnya. Untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan hendaknya dibutuhkan masyarakat yang unggul dari segi SDM-nya.

Konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, nampaknya mulai dikesampingkan dikarenakan disparitas kota/desa sangat berpengaruh. Oleh karenanya sudut pandang pembangunan manusia dapat memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) kediskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Selama ini model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan PDB dari pada memperbaiki kualitas hidup manusia. Disisi lain 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' hanya melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga harus diperhatikan aspek kualitas. Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam usaha meningkatkan kualitas manusia, melingkupi aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan atau daya beli maupun aspek moralitas. Tidak dipungkiri berbagai upaya tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan utama yaitu menciptakan manusia berkualitas. Oleh karena itu pembangunan bukan perkara mudah karena mencakup segi-segi kehidupan yang kompleks maka diperlukan indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan

pembangunan manusia. Alat ukur inilah yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Konsep inilah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara maupun wilayah tertentu yang pembangunannya tidak hanya ditandai oleh tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi melainkan juga mencakup pula kualitas manusianya. Inilah yang akan menjadi tantangan semua pihak, bagaimana menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia.

Secara konseptual IPM adalah alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari suatu wilayah yang terdiri dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (long and healthy life), pengetahuan (knowledge) serta standar hidup layak (a decent standard of living). Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Dengan semakin berkembangnya teknik perhitungan IPM yang akan lebih mengakomodir kelemahan yang ada, maka pada tahun 2010 UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tepatnya pada tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi IPM dan hasilnya pada tahun yang sama UNDP mencatat beberapa negara yang mengalami kemajuan tercepat dalam peningkatan IPM. Tercatat Indonesia dalam kurun waktu 1970-2010 termasuk dalam World's Top Movers in HDI Improvement. IPM Indonesia tahun 2013 sebesar 68,5 (kategori menengah) dan menduduki peringkat 108 dari 187 negara.

Secara umum IPM memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah :

- Ukuran Keberhasilan
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
- Target Pembangunan
Dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI, IPM dijadikan salah satu indikator target pembangunan.
- Dana Alokasi Umum
Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR dan Susenas Modul Konsumsi, data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Kabupaten Pinrang yang merupakan daerah dengan salah satu dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang baik di Propinsi Sulawesi Selatan, menarik kiranya melihat aspek atau komponen-komponen pembentuk IPM.

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya Kabupaten Pinrang, 2013-2017

Komponen	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (tahun)	68,00	68,03	68,43	68,55	68,68
Harapan Lama Sekolah	12,52	13,16	13,17	13,18	13,19
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,43	7,45	7,47	7,48	7,54
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	10 605	10 680	10 791	10 899	11 279
IPM	68,14	68,92	69,24	69,42	69,90

Sumber : BPS Pinrang

Dimensi Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Indeks Kesehatan dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 20 tahun.

AHH dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan. Kurun waktu 2013-2017 AHH Kabupaten Pinrang terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah telah berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017 AHH sebesar 68,68 yang artinya bayi-bayi yang dilahirkan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 diperkirakan akan bertahan hidup hingga 68 sampai 69 tahun lagi.

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan UNDP. Pada tahun 2017 RLS sebesar 7,54 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Pinrang bersekolah sampai dengan 7-8 tahun yang bisa diartikan sampai kelas 1-2 SMP. Karena semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Namun setidaknya kurun waktu 2013-2017 telah menunjukkan tren kearah positif, yang artinya berbagai program pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan RLS ini berjalan.

Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertent pada masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa Negara. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Pada tahun 2017 HLS sebesar 13,19 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Pinrang mengaharapkan akan sekolah hingga tamat SMA dan menduduki perguruan tinggi walaupun tidak sampai tamat.

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi selanjutnya dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Standar hidup layak diproksi dengan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul dan dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan Paritas Daya Beli menggunakan 96 komoditas yaitu 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

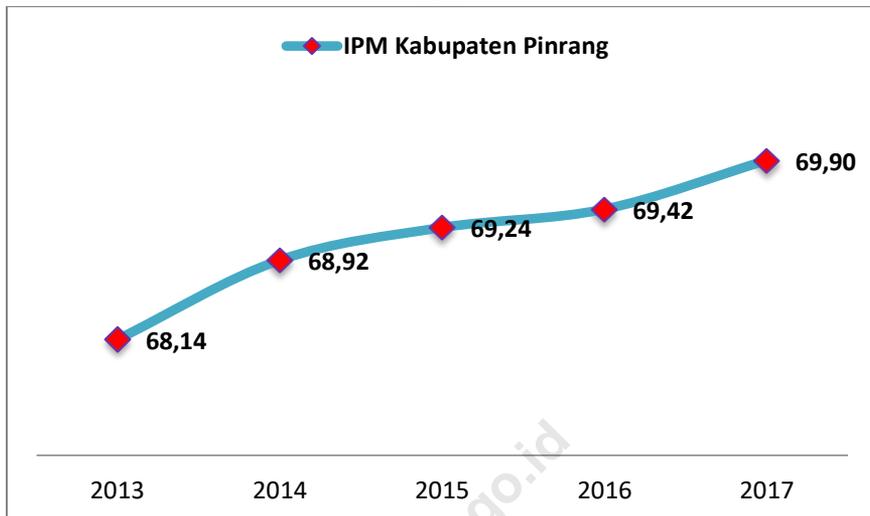
Komponen yang terakhir adalah daya beli di Kabupaten Pinrang sendiri pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Paritas daya beli (PPP) sebesar 11.279

ribu rupiah atau berada diatas PPP Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya 10.489 ribu rupiah. Yang artinya paritas daya beli penduduk di Kabupaten Pinrang menunjukkan daya beli cukup tinggi setidaknya diatas PPP Propinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini tidak terlepas dari lokasi yang dekat dengan kota-kota penyangga seperti Kota Pare-Pare maupun Kota Makasar. Akses yang mudah dan budaya secara umum suku-suku di Pinrang yang lebih konsumtif menyebabkan paritas daya beli tinggi.

Berdasarkan teknik penghitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya diperoleh IPM Kabupaten Pinrang tahun 2017 adalah sebesar 69,90 yang merupakan akumulasi dari angka harapan hidup 68,68 tahun, harapan lama sekolah penduduk sebesar 13,19 tahun, dan rata-rata lama sekolah 7,54 tahun, serta pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar 11.279 ribu rupiah. Jika mengaju pada skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi sangat tinggi ($IPM > 80$), kategori tinggi ($70 < IPM < 80$), kategori sedang ($60 < IPM < 70$) dan kategori rendah ($IPM < 60$), maka terlihat bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 IPM Kabupaten Pinrang masih stagnan pada kategori IPM sedang. Tumbuhnya berbagai pusat bisnis dan pertanian ternyata mampu mempertahankan IPM Kabupaten Pinrang kearah yang lebih baik, terbukti saat ini hampir mendekati 70 (kategori tinggi).

Berdasarkan data dan juga hasil perhitungan IPM tampaknya proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang sudah cukup baik. Meskipun demikian karena manusia selalu tumbuh dan berkembang yang selalu seiring dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan kehidupan, maka masih banyak hal yang harus ditingkatkan.

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang, Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Pinrang

Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa peringkat IPM tertinggi pada tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar, disusul oleh Kota Palopo dan Kabupaten Parepare. Kabupaten Pinrang sendiri berada pada urutan yang baik yaitu peringkat 6 dari 24 kabupaten/kota.

Tabel 3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Peringkat IPM 2017	Laju IPM 2016-2017 (%)
1	Kep. Selayar	63,16	63,66	64,32	64,95	65,39	22	0,68
2	Bulukumba	64,27	65,24	65,58	66,46	67,08	17	0,93
3	Bantaeng	64,88	65,77	66,20	66,59	67,27	15	1,02
4	Jeneponto	60,55	61,45	61,61	61,81	62,67	24	1,39
5	Takalar	62,58	63,53	64,07	64,96	65,48	21	0,80
6	Gowa	65,45	66,12	66,87	67,70	68,33	12	0,93
7	Sinjai	63,47	63,83	64,48	65,36	65,80	20	0,67
8	Maros	66,06	66,65	67,13	67,76	68,42	10	0,97
9	Pangkep	65,24	66,16	66,65	66,86	67,25	16	0,58

10	Barru	67,02	67,94	68,64	69,07	69,56	8	0,71
11	Bone	61,40	62,09	63,11	63,86	64,16	23	0,47
12	Soppeng	64,43	64,74	65,33	65,95	66,67	19	1,09
13	Wajo	65,79	66,49	66,90	67,52	68,18	13	0,98
14	Sidrap	67,15	68,14	69,00	69,39	69,84	7	0,65
15	Pinrang	68,14	68,92	69,24	69,42	69,90	6	0,69
16	Enrekang	68,39	69,37	70,03	70,79	71,44	5	0,92
17	Luwu	66,39	67,34	68,11	68,71	69,02	9	0,45
18	Tana Toraja	64,55	65,08	65,75	66,25	66,82	18	0,86
19	Luwu Utara	66,40	66,90	67,44	67,81	68,35	11	0,80
20	Luwu Timur	69,53	69,75	70,43	70,95	71,46	4	0,72
21	Toraja Utara	65,65	66,15	66,76	67,49	67,90	14	0,61
22	Makassar	78,98	79,35	79,94	80,53	81,13	1	0,75
23	Pare-Pare	75,10	75,66	76,31	76,48	76,68	3	0,26
24	Palopo	75,02	75,65	76,27	76,45	76,71	2	0,34
Sulawesi Selatan		67,92	68,49	69,15	69,76	70,34		0,83

Sumber : BPS Pinrang

Data hasil perhitungan IPM yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang pada posisi yang relatif baik namun pada tahun 2017 tidak terlalu tinggi yaitu 0,69 persen dibandingkan dengan provinsi sebesar 0,83 persen. Sehingga pada tahun 2017 untuk pertama kalinya IPM Kabupaten Pinrang dibawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 70,34.

Hal ini terlihat pada beberapa komponen penyusun IPM seperti Angka Harapan Hidup sebesar 68,68 tahun sedangkan provinsi mengalami peningkatan lebih tinggi hingga mencapai 69,84 tahun. harapan lama sekolah pada tahun sebesar 13,18 tahun berada diatas HLS Provinsi Sulawesi Selatan yang 13,16 tahun sedangkan pada tahun ini berada dibawah HLS Provinsi Sulawesi Selatan 13,28 tahun sedangkan HLS Kabupaten Pinrang 13,19 persen. Kemudian untuk daya beli di Kabupaten Pinrang sendiri menunjukkan Paritas daya beli (PPP) Kabupaten Pinrang sebesar 11.279 ribu rupiah atau masih berada diatas PPP Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya 10.489 ribu rupiah.

Tabel 3.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016 & 2017

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Kep, Selayar	67,76	67,82	12,44	12,45	7,17	7,18	8 123	8 436
Bulukumba	66,84	66,96	12,64	12,65	6,86	7,16	10 040	10 217
Bantaeng	69,84	69,90	11,88	11,99	6,17	6,45	10 596	10 751
Jeneponto	65,57	65,65	11,77	11,93	5,65	5,98	8 559	8 747
Takalar	66,29	66,38	12,00	12,21	6,64	6,77	9 759	9 845
Gowa	69,92	69,95	13,03	13,04	7,52	7,74	8 717	9 009
Sinjai	66,54	66,61	12,83	12,84	7,06	7,28	8 706	8 816
Maros	68,58	68,60	12,96	12,97	7,20	7,42	9 758	10 121
Pangkep	65,77	65,86	12,39	12,40	7,33	7,48	10 670	10 837
Barru	68,16	68,30	13,54	13,55	7,61	7,85	10 155	10 285
Bone	66,12	66,22	12,42	12,43	6,76	6,77	8 275	8 470
Soppeng	68,62	68,72	12,20	12,33	7,06	7,42	8 965	9 035
Wajo	66,38	66,52	13,08	13,09	6,38	6,78	11 681	11 770
Sidrap	68,69	68,82	12,89	12,90	7,33	7,52	11 368	11 523
Pinrang	68,55	68,68	13,18	13,19	7,48	7,54	10 899	11 279
Enrekang	70,34	70,38	13,65	13,66	8,06	8,43	10 188	10 359
Luwu	69,52	69,60	13,27	13,28	7,75	7,89	9 301	9 381
Tana Toraja	72,48	72,56	13,24	13,25	7,92	7,93	6 509	6 801
Luwu Utara	67,50	67,61	12,33	12,38	7,39	7,52	10 786	11 101
Luwu Timur	69,71	69,79	12,78	12,79	7,88	8,20	11 960	12 030
Toraja Utara	72,87	72,94	13,33	13,34	7,72	7,73	7 228	7 457
Makassar	71,49	71,51	14,80	15,18	11,07	11,08	16 013	16 367
Pare-Pare	70,64	70,69	14,45	14,46	10,02	10,09	12 966	13 078
Palopo	70,25	70,30	15,03	15,05	10,26	10,33	12 156	12 319
SULSEL	69,82	69,84	13,16	13,28	7,75	7,95	10 281	10 489

Sumber : BPS Pinrang

Angka harapan hidup yang sudah dibawah rata-rata maka diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk dapat lebih meningkatkan sarana dan dan prasarana bidang kesehatan dan diharapkan juga kedepannya masyarakat bisa sejahtera memiliki umur yang panjang dan sehat.

Kendati data rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Pinrang sudah menunjukkan kearah yang positif bukan berarti pemerintah berpuas akan pencapaian tersebut. Harapan lama sekolah merupakan pemicu (booster) bagi peningkatan pembangunan manusia dibidang pendidikan. Karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk lebih meningkatkan lagi sarana prasarana serta kualitas pendidikan agar dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dan akhirnya mencapai pembangunan manusia yang baik di bidang pendidikan.

Peringkat tertinggi keenam dalam pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Selatan menjadikan pemerintah Kabupaten Pinrang hendaknya tetap mawas diri dan tetap terus melakukan upaya-upaya pembangunan yang pro rakyat yaitu dengan lebih meningkatkan kualitas pembangunan agar lebih dapat dinikmati oleh masyarakat, terutama di bidang pendidikan serta sarana prasarana agar pertumbuhan ekonomi juga dinikmati masyarakat. Sehingga, kedepannya pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang semakin baik yang ditunjukkan oleh terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di kabupaten ini.

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut *United Nations* mengacu pada persamaan hak, tanggungjawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

UNDP menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia. Namun IPM nyatanya belum mempertimbangkan ketimpangan gender sehingga UNDP mengembangkan *Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Gender sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM

diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada Tahun 2015 di Kabupaten Pinrang IPM laki-laki 71,69 dan IPM perempuan 67,91. Secara umum kualitas perempuan masih tertinggal dari laki-laki. IPM laki-laki sudah masuk dalam kategori pencapaian tinggi (antara 70 sampai dengan 80), sedangkan IPM perempuan masih dalam taraf sedang (antara 60 sampai dengan 70). Akan tetapi dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi pendorong peningkatan IPG selama beberapa tahun. Sejak tahun 2012, IPG sudah melebihi angka 90, dan di tahun 2017 nilainya sudah mencapai 95,44

Tabel 3.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2017

Kabupaten / Kota	2013	2014	2015	2016	2017		
					IPM laki-laki	IPM Perempuan	IPG
Kep, Selayar	91,16	91,37	91,82	*	70,66	64,28	90,97
Bulukumba	94,46	95,74	96,08	*	69,41	67,02	96,56
Bantaeng	96,62	96,86	96,38	*	68,44	65,21	95,28
Jeneponto	88,85	90,16	90,17	*	67,47	61,36	90,94
Takalar	85,57	86,91	87,37	*	70,09	60,81	86,76
Gowa	85,24	87,85	87,92	*	72,84	63,87	87,69
Sinjai	98,51	98,52	98,61	*	66,93	65,60	98,01
Maros	88,21	88,61	88,84	*	73,21	65,09	88,91
Pangkep	89,45	89,74	89,75	*	72,16	64,41	89,26
Barru	95,11	95,36	95,02	*	72,34	69,09	95,51
Bone	90,71	91,37	91,93	*	67,85	62,86	92,65
Soppeng	98,9	98,96	98,42	*	68,12	66,37	97,43
Wajo	88,28	88,86	89,1	*	72,89	65,53	89,90
Sidrap	90,46	91,5	91,51	*	73,71	67,97	92,21
Pinrang	93,11	94,89	94,73	*	72,22	68,93	95,44
Enrekang	98	98,08	97,95	*	71,99	70,64	98,12
Luwu	91,69	91,88	91,89	*	72,32	66,91	92,52
Tana Toraja	85,98	86,38	86,57	*	72,01	62,78	87,18
Luwu Utara	88,21	88,55	88,68	*	71,99	63,98	88,87
Luwu Timur	88,61	89,02	89,31	*	76,03	68,04	89,49
Toraja Utara	84,61	85,04	85,61	*	72,30	62,20	86,03
Kota Makasar	93,4	93,58	93,96	*	83,28	78,87	94,70
Kota Pare Pare	97,05	97,27	97,29	*	78,19	76,21	97,47
Kota Palopo	95,66	96,81	97,2	*	78,17	76,27	97,57
Sulawesi Selatan	92,34	92,6	92,92	*	74,21	68,90	92,84

Ket : *) Tidak tersedia karena tidak dilaksanakan survei sakernas 2016

Sumber : BPS Pinrang

Capaian IPM yang tinggi tidak serta merta memberikan IPG yang tinggi. Meskipun IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah sudah berada pada level yang tinggi, jika tidak setara maka akan memberikan IPG yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya. IPG yang lebih tinggi dapat terjadi pada wilayah yang memiliki IPM laki-laki dan perempuan yang lebih rendah namun setara. Hal ini terjadi pada kasus Kabupaten Sinjai yaitu IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten ini lebih rendah dibandingkan Kota Makassar, namun IPGnya lebih tinggi. Penyebabnya adalah gap antara IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sinjai lebih kecil dibandingkan Kota Makassar.

Berbagai upaya untuk mendorong kapabilitas perempuan Indonesia di segala bidang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya melalui produk-produk hukum yang lebih memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi. Selain meningkatkan kemampuan dasar seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, program pemberdayaan perempuan juga memperjuangkan peningkatan jumlah peran perempuan dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaannya pemerintah telah membangun kerjasama antar kementerian dan menyusun anggaran yang responsif gender. Disamping itu untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di daerah, Pemerintah Daerah harus melaksanakannya sesuai amanat UU Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan sinergi yang baik antara program pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemberdayaan perempuan di Indonesia menjadi lebih nyata dan menyeluruh. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan Khususnya di Kabupaten Pinrang, maka pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi sangat penting.

3.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017			IDG
			Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sbg Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	
Kep, Selayar	62,75	*	16,00	54,69	31,56	64,74
Bulukumba	63,74	*	17,50	56,04	33,43	67,16
Bantaeng	79,24	*	32,00	63,56	36,58	77,74
Jeneponto	67,39	*	20,00	55,72	30,94	67,93
Takalar	68,87	*	26,67	66,86	27,76	66,60
Gowa	67,99	*	17,78	48,36	32,70	69,01
Sinjai	69,69	*	26,67	56,18	32,67	72,56
Maros	64,55	*	20,00	48,54	26,17	65,16
Pangkep	57,28	*	8,57	58,08	31,49	56,96
Barru	64,62	*	24,00	65,19	25,47	63,54
Bone	62,49	*	13,33	56,82	31,91	62,75
Soppeng	65,76	*	20,00	50,79	33,39	69,35
Wajo	59,72	*	17,50	62,28	26,28	60,62
Sidrap	49,16	*	2,86	44,99	28,99	49,02
Pinrang	59,02	*	7,50	50,62	34,51	59,61
Enrekang	58,59	*	6,67	58,33	36,30	58,68
Luwu	62,47	*	8,57	50,24	36,44	61,61
Tana Toraja	73,38	*	20,00	55,58	40,55	73,99
Luwu Utara	43,74	*	5,71	56,83	19,71	44,98
Luwu Timur	45,72	*	3,33	50,86	22,62	45,96
Toraja Utara	57,8	*	5,71	54,99	33,69	56,04
Kota Makasar	69,21	*	16,00	41,60	34,62	68,73
Kota Pare Pare	61,86	*	12,00	59,48	31,56	61,56
Kota Palopo	70,91	*	20,00	58,31	34,17	70,85
Sulawesi Selatan	67,98	*	21,18	51,62	31,63	70,57

Sumber : BPS Pinrang

IDG Kabupaten Pinrang tahun 2017 berada pada 59,61 persen atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat dari komponen pembentuknya, peningkatan IDG Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 disebabkan oleh peningkatan persentase jumlah perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional dari 54,63 persen pada tahun 2015 menjadi 50,62 persen pada tahun 2017 dan persentase sumbangan pendapatan perempuan dari 34,50 pada tahun 2015 menjadi 34,51 pada tahun 2017. Sementara keterlibatan perempuan di parlemen persentasenya relatif tidak berubah berada di posisi 7,50 persen. Di antara ketiga variabel tersebut, capaian perempuan sebagai tenaga profesional merupakan yang tertinggi bahkan melawati capaian laki-laki. Artinya daya serap tenaga kerja profesional perempuan di Kabupaten Pinrang lebih baik dibandingkan laki-laki.

Hal yang lumrah terjadi di dunia jika pemberdayaan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Meskipun upaya pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal khususnya di bidang politik dan ekonomi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain karena masih adanya dikotomi antara ruang publik dan privat yang membatasi peran perempuan. Perempuan tidak memiliki daya saing secara finansial, perempuan memiliki kekurangan dalam kekuasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitan untuk masuk keranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki (UNDP, 2010). Oleh sebab itu peningkatan kapasitas perempuan merupakan hal yang mendesak sehingga mampu mendobrak berbagai ideologi dan budaya yang menghambat peran perempuan di semua bidang pembangunan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan berpotensi meningkatkan juga jumlah permasalahan kependudukan salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran timbul karena terjadi kesenjangan antara SDM dengan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk sedangkan lapangan kerja yang tersedia terbatas, akibatnya pengangguran akan semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Perlu disadari semua pihak bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Oleh karenanya BPS konsisten sejak tahun 1984 menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, yang data utamanya berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi.

Salah satu pendekatan untuk mengukur jumlah dan persentase penduduk miskin adalah dengan pendekatan kebutuhan dasar. Dalam menghitung angka kemiskinan melalui komponen kebutuhan dasar yang digunakan BPS terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Mulai tahun 1998 pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan BPS telah dilakukan penyempurnaan, yaitu jumlah komponen kebutuhan dasar terdiri atas 52 jenis komoditi makanan dan 51 komoditi bukan makanan di daerah perkotaan dan 47 komoditi di daerah perdesaan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 4.1 Statistik Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017

Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (000)	32,1	29,92	30,51	31,28	31,43
Persentase Penduduk Miskin	8,86	8,20	8,34	8,48	8,46
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	221.717	228.150	234.897	250.163	256.054

Sumber : BPS Pinrang

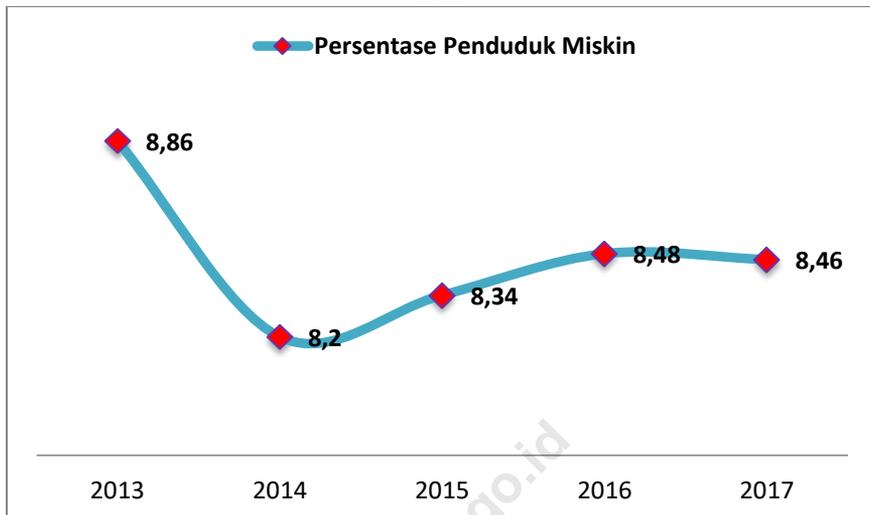
Perkembangan tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang pada periode tahun 2013-2017 ditunjukkan pada tabel 5.1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Pada periode 2013-2014 terlihat adanya tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2013-2014 adalah sebesar 2,18 ribu jiwa, yaitu 32,1 ribu jiwa pada tahun 2013 menjadi 29,92 ribu jiwa tahun 2014.

Kemudian pada tahun berikutnya 2015-2017 terjadi kenaikan baik secara absolut maupun relatif yaitu masing-masing menjadi 30,51 ribu jiwa atau 8,34 persen (tahun 2015) dan 31,28 ribu jiwa atau 8,48 persen (tahun 2016) dan 31,43 atau 8,46 persen (tahun 2017). Menjamurnya teknologi online baik dari sektor perdagangan, teknologi informasi, maupun jasa-jasa diindikasikan menjadi salah satu faktor penyebab naiknya angka kemiskinan pada tahun 2016 dan 2017. Dikarenakan perubahan proses penciptaan barang dan jasa yang awalnya membutuhkan banyak tenaga kerja secara konvensional, tetapi semenjak 'online' merebak sedikit demi sedikit penggunaan tenaga kerja pada sektor-sektor yang disebut diatas semakin tergerus pula. Inilah yang memungkinkan semakin tingginya pengangguran yang berdampak pada jumlah penduduk miskin.

Garis kemiskinan pada tahun 2013 - 2016 terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 34.327,- perkapita per bulan, yaitu dari Rp. 221.717,- pada tahun 2013 menjadi Rp. 256.054,- pada tahun 2017.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Pinrang

Beberapa indikator tentang tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel 5.2 dibawah ini yang menampilkan tren tingkat kemiskinan antara kondisi Tahun 2016 dan 2017. Serta menampilkan Analisis mengenai garis kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan (p1) dan keparahan kemiskinan (p2).

Tabel 4.2 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2017

Kabupaten/ Kota	2016				2017			
	Jumlah (ribu)	%	P1	P2	Jumlah (ribu)	%	P1	P2
Selayar	17,21	13,11	2,19	0,65	17,62	13,28	3,74	1,42
Bulukumba	33,25	8,06	1,72	0,52	33,10	7,97	1,10	0,26
Bantaeng	17,53	9,51	1,78	0,59	17,91	9,66	1,43	0,33
Jeneponto	55,32	15,49	3,25	0,96	55,35	15,40	2,84	0,77
Takalar	27,05	9,35	1,34	0,35	26,99	9,24	1,68	0,40
Gowa	61,52	8,40	1,59	0,47	62,77	8,42	1,42	0,39
Sinjai	22,51	9,41	1,66	0,43	22,25	9,24	1,04	0,19
Maros	39,02	11,41	2,46	0,79	38,50	11,14	2,58	0,86

Pangkep	52,86	16,22	3,11	0,97	53,38	16,22	3,04	0,88
Barru	16,24	9,45	1,71	0,52	16,76	9,71	1,43	0,32
Bone	75,09	10,07	1,51	0,31	77,13	10,28	1,56	0,39
Soppeng	19,12	8,45	1,73	0,50	18,76	8,29	1,25	0,28
Wajo	29,46	7,47	1,12	0,30	29,19	7,38	1,53	0,47
Sidrap	15,92	5,45	0,98	0,24	15,72	5,32	0,85	0,21
Pinrang	31,28	8,48	1,30	0,36	31,43	8,46	1,62	0,44
Enrekang	26,98	13,41	2,32	0,64	26,71	13,16	1,83	0,43
Luwu	50,58	14,35	2,32	0,61	49,80	14,01	2,96	0,92
Tator	28,42	12,36	2,65	0,98	29,18	12,62	2,15	0,53
Lutra	43,75	14,36	2,29	0,60	44,04	14,33	2,02	0,46
Lutim	21,08	7,52	1,09	0,23	21,94	7,66	1,60	0,50
Toraja utara	33,02	14,57	3,76	1,34	32,85	14,41	2,20	0,52
Makassar	66,78	4,56	0,67	0,16	68,19	4,59	0,64	0,13
Pare-pare	8,02	5,73	0,82	0,19	8,07	5,70	0,85	0,24
Palopo	15,02	8,74	1,17	0,28	15,44	8,78	1,75	0,60
SULSEL	807,03	9,40	1,83	0,55	813,07	9,38	1,72	0,46

Sumber : BPS Pinrang

Masalah kemiskinan tidak hanya sekadar jumlah maupun persentase penduduk miskin, akan tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada periode tahun 2016-2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pinrang meningkat dari 1,30 pada keadaan tahun 2016 menjadi 1,62 pada keadaan tahun 2017. Dapat diartikan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan (kesenjangan/ketimpangan) pada tahun 2016 relatif lebih baik bila dibandingkan dengan pada tahun 2017.

Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selaras dengan

hal tersebut diatas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan dari 0,36 (tahun 2016) menjadi 0,44 (tahun 2017). Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pinrang tahun 2016 memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibanding tahun 2017.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

- BPS Kabupaten Pinrang, 2017. Indikator Ekonomi Kabupaten Pinrang 2017. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- BPS Kabupaten Pinrang, 2017. Proyeksi Penduduk Kabupaten Pinrang 2010-2020. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- _____. Indikator Sosial ekonomi Makro Kabupaten Pinrang 2017. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2017. Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2010-20120. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017. Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 3 2017. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- BPS Kabupaten Pinrang, 2018. Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2018. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018. Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2018. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan 2010-2105. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 1 2018. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2013-2017. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan



DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No.18 Pinrang 91211 Telp. (0421) 921021, Fax (0421)921021
Homepage: <http://pinrangkab.bps.go.id> E-mail: bps7315@bps.go.id